

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah terus memantau dan mendorong pertumbuhan dan kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mengasuransikan dan mendorong keberlanjutan UMKM. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut (*UU No. 20 Tahun 2008, 2008*) adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini disebut Usaha Mikro memiliki kriteria aset: maksimal 30 juta rupiah, dan kriteria omzet: maksimal 300 juta rupiah.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari suatu usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria aset : maksimal 50 juta sampai dengan 500 juta rupiah; kriteria omzet: maksimal 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berjalan secara mandiri dan dilakukan oleh orang-orang yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, atau yang menjadi bagian dari jumlah

kekayaan bersih baik langsung maupun tidak langsung atau penjualan tahunan sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang. Kriteria aset: maksimum 500 juta hingga 50 miliar rupiah, dan kriteria omset: maksimum 2,5 miliar hingga 50 miliar rupiah.

Di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kapasitas yang signifikan dalam perekonomian nasional dalam hal menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang wajar kepada masyarakat berpenghasilan rendah. UMKM merupakan sektor ekonomi yang paling penting dan terkait dengan mata pencaharian banyak orang, menjadikannya salah satu bagian terpenting dari perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara berupa produk domestik bruto (PDB). Dilansir dari ekon.go.id, (2022) kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5%, dan penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Tak luput pula di Kabupaten Kudus Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menggerakkan roda perekonomian, hal tersebut bisa dilihat dari tingginya laju pertumbuhan PDRB per tahun. Dilansir dari bps.go.id, (2023) nilai PDRB Kabupaten Kudus atas dasar harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 69,72 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 71,43 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 kabupaten Kudus mengalami pertumbuhan ekonomi 2,23 persen. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh tumbuhnya produksi di lapangan usaha Industri

Pengolahan dan adanya inflasi. Peningkatan PDRB ini dapat mengindikasikan naiknya kinerja suatu UMKM (Joko *et al.*, 2022).

Kinerja UMKM merupakan tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya, yang diukur dari penjualan, modal, jumlah karyawan, pangsa pasar, dan laba yang terus berkembang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Joko *et al.*, (2022) dan Kinasih *et al.*, (2021) salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja UMKM adalah literasi keuangan, inklusi keuangan, inovasi, dan *e-commerce*. Akan tetapi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus masih terdapat berbagai permasalahan yang sering ditemui.

Salah satunya adalah tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan pada lembaga keuangan masih tergolong rendah. Literasi keuangan diartikan sebagai pengetahuan, perilaku, dan sikap seseorang terhadap pengelolaan uang (Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016). Dilansir dari dinkop-umkm jateng (2022), keterbatasan modal merupakan masalah yang melekat pada UMKM dalam mengembangkan usaha produktifnya salah satunya di Kabupaten Kudus. Pembukaan usaha merupakan syarat penting yang dibutuhkan perbankan/non bank apabila ingin mengakses pembiayaan. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, tengah gencar untuk melakukan sosialisasi dalam upaya peningkatan akses pembiayaan melalui literasi keuangan bagi UMKM di Kabupaten Kudus. Hasil survei nasional literasi keuangan dan inklusi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menunjukkan gap yang masih besar, sehingga masih menjadi salah satu indikasi permasalahan-permasalahan

konsumen di sektor jasa keuangan. Kurangnya pengetahuan keuangan (literasi keuangan) akan mengakibatkan perencanaan keuangan yang buruk, dan kurangnya tujuan keuangan yang jelas pada akhirnya akan menurunkan kinerja UMKM. Alhasil, pemahaman akan konsep dasar, manfaat, dan pengelolaan keuangan, serta didukung dengan perilaku dan sikap terkait keuangan yang baik, akan menghasilkan pengetahuan keuangan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja UMKM, termasuk penjualan yang terus meningkat dan disertai dengan peningkatan laba. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya Maulana, (2021), Aribawa *et al.*, (2016), dan Kasendah *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berdampak positif pada kinerja UMKM. Namun, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya yaitu Naufal, (2022) dan Christina, (2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Selanjutnya, inklusi keuangan merupakan tersedianya akses keuangan terhadap layanan keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2017). Dilansir dari dinkop-umkm jateng (2022), distribusi UMKM berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya mereka memiliki peluang yang luas dalam berwirausaha, namun para pelaku usaha tetap menghadapi tantangan dalam mengembangkan usahanya karena sulitnya mengakses layanan keuangan. Menurut Hilmawati & Kusumaningtias, (2021) kesulitan mengakses layanan keuangan, khususnya pembiayaan, terjadi karena persyaratan pengajuan pembiayaan tidak terpenuhi. Akibatnya, tindakan berikut dapat diambil untuk mengatasi masalah permodalan

yaitu dengan menerapkan inklusi keuangan (Yanti, 2019) yang berimplikasi bahwa ketika akses keuangan pembiayaan (permodalan) menjadi indikator terpenting dalam meningkatkan kinerja UMKM, maka akan berpengaruh pada peningkatan laba usaha. Hal ini sesuai dengan temuan Oleh Sanistasya *et al.*, (2019) dan Christina, (2022) bahwa inklusi keuangan berdampak positif pada kinerja UMKM. Namun, hal ini bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya Puspitasari & Astrini,(2021) dan Hilmawati & Kusumaningtias, (2021) bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Pada era-digitalisasi, tantangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ke depan yang harus diatasi bersama oleh segenap *stakeholders* berkaitan dengan inovasi dan teknologi, sehingga diharapkan dapat memperbaiki daya saing yang dimiliki pada era-digitalisasi global pada saat ini (ekon.go.id, 2022). Inovasi merupakan kebutuhan dasar yang akan meningkatkan kinerja UMKM. Manfaat inovasi dari segi produk, proses, organisasi, dan pemasaran kreatif akan menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki pesaing. Alhasil, ketika pelaku UMKM memiliki inovasi terbaru, daya beli masyarakat akan tetap stabil jika tidak meningkat. Peningkatan penjualan akan menghasilkan keuntungan yang meningkat, yang memungkinkan para pelaku usaha meningkatkan kinerjanya secara optimal. Menurut Bastian, (2010:137), ukuran kinerja seringkali dipersepsikan sebagai seberapa besar keuntungan yang diperoleh. Penelitian yang membahas mengenai pengaruh kinerja UMKM terhadap inovasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yang diantaranya penelitian yang dilakukan Maulana, (2021) dan Sulastini *et al.*, (2021) yang menunjukkan hasil bahwa dengan

penerapan inovasi dapat berpengaruh secara positif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Joko *et al.*, (2022) menunjukkan hasil bahwa inovasi tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Perkembangan teknologi yang bersamaan dengan pandemi Covid-19 mempercepat transformasi digital UMKM. Saat ini Indonesia merupakan pasar potensial *e-commerce* ritel yang menguntungkan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Namun masih banyak UMKM yang belum menerapkan *e-commerce* dikarenakan minimnya pengetahuan tentang teknologi. Dengan diterapkannya *e-commerce*, pelaku usaha dapat tetap memasarkan produknya tanpa harus bertemu langsung dengan pelanggan, melainkan mengandalkan media elektronik. Alhasil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat tetap menjalankan usahanya seperti sebelum pandemi, atau bahkan meningkatkan kinerja usahanya. Penelitian yang membahas mengenai pengaruh kinerja UMKM terhadap *e-commerce* telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang diantaranya penelitian yang dilakukan Humairoh *et al.*, (2022) yang menunjukkan hasil bahwa dengan penerapan *e-commerce* dapat berpengaruh secara positif terhadap kinerja UMKM. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subagio & Saraswati, (2020) menunjukkan hasil bahwa *e-commerce* tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM.

Beberapa hasil penelitian tentang pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, inovasi, dan *e-commerce* pada kinerja UMKM menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara satu penelitian dengan penelitian lainnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari berbagai perbedaan, seperti waktu, lokasi, kondisi ekonomi, dan objek penelitian yang digunakan oleh masing-masing peneliti. Oleh karena itu,

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang untuk melihat ada tidaknya perbedaan hasil penelitian bila digunakan sampel, lokasi, waktu penelitian dan penambahan variabel yang baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan, Inovasi, dan *E-Commerce* Terhadap Kinerja UMKM Di Kabupaten Kudus”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup mengenai penelitian ini meliputi :

1. Variabel independen yang diteliti adalah literasi keuangan, inklusi keuangan, inovasi, dan *e-commerce*. Variabel dependen yang diteliti adalah kinerja UMKM.
2. Objek penelitian ini adalah UMKM di Kabupaten Kudus.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus?
3. Apakah inovasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus?
4. Apakah *e-commerce* berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus.
2. Untuk menguji pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus.
3. Untuk menguji pengaruh inovasi terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus.
4. Untuk menguji pengaruh *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Kudus.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Peneliti

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan literatur untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bisa menjadi penambah wawasan maupun pengetahuan untuk para pembaca. Hasil dari penelitian ini besar harapan mampu dijadikan sebagai saran bagi pihak-pihak yang berkebutuhan atau berkepentingan dan bisa menambah wawasan serta pengalaman mengenai kajian tentang pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, inovasi dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di kabupaten Kudus.



## 2. Akademik

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai pelengkap maupun pembanding dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta bisa dijadikan sebagai perbendaharaan kepustakaan bagi fakultas maupun universitas. Serta penelitian ini bisa digunakan untuk referensi penelitian-penelitian sejenis di masa mendatang.

## 3. Pelaku UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi ataupun kontribusi untuk pelaku UMKM agar lebih meningkatkan pemahamannya mengenai literasi keuangan, inklusi keuangan, inovasi dan *e-commerce* dalam meningkatkan kinerja UMKM.

## 4. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan dalam pengambilan keputusan berupa kajian-kajian yang pro UMKM sehingga UMKM bisa berjalan dengan baik dan fungsi-fungsi UMKM bagi masyarakat ataupun negara bisa berjalan dengan baik.